

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM

Zakiah Al Munawarah¹, Muzakkir², Hasyim Haddade³

^{1,2,3}Pendidikan dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: [1zakiah.hasan18@gmail.com](mailto:zakiah.hasan18@gmail.com), [2muzakkir.ftk@uin-alauddin.ac.id](mailto:muzakkir.ftk@uin-alauddin.ac.id),

[3hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id)

Intisari

Pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah upaya berkelanjutan untuk menyampaikan informasi, nilai-nilai, dan budaya keagamaan agar cita-cita tersebut dapat menjadi standar perilaku, sikap, dan pola pikir serta menjadi sumber inspirasi dan cita-cita. Sementara itu, terdapat kemauan yang kuat dari masyarakat Indonesia untuk senantiasa kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten dan murni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama, dan pendidikan agama pada khususnya, menjadi semakin penting dalam struktur dan organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Tujuan Penelitian ini untuk: (1) mengkaji sejarah perkembangan (PAI) di sekolah umum (2) mengkaji kurikulum (PAI) di sekolah umum (3) hambatan dan solusi (PAI) di sekolah umum (4) Jam Pelajaran Pendidikan Agama Pada Sekolah Umum (5) Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Merdeka Belajar.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Sekolah Umum

Abstract

Islamic religious education is essentially a continuous effort to convey information, values and religious culture so that these ideals can become standards of behavior, attitudes and thought patterns and become a source of inspiration and ideals. Meanwhile, there is a strong will among the Indonesian people to always return to Pancasila and the 1945 Constitution consistently and purely. These findings suggest that religious life, and religious education in particular, is becoming increasingly important in government structures and organizations. This research uses the literature study method. The aim of this research is to: (1) examine the history of development (PAI) in public schools (2) examine the curriculum (PAI) in public schools (3) obstacles and solutions (PAI) in public schools (4) Religious Education Class Hours in Public Schools (5) Islamic Religious Education in the Context of Independent Learning.

Keywords: *Islamic Religious Education, Public Schools*

PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan Islam, istilah “pendidikan” telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh berbagai kelompok, banyak di antaranya dipengaruhi oleh pandangan dunia. Namun definisi yang beragam tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu pendidikan adalah proses mempersiapkan generasi mendatang untuk menjalani kehidupannya dan mencapai tujuannya. Lebih sukses dan produktif. Siswa menerima lebih banyak dari pendidikan daripada sekedar pengetahuan yakni, nilai-nilai yang ditransfer. Selain itu, agar siswa dapat berkembang, karya budaya mengharuskan mereka terus mengembangkan potensi dan kemampuan kreatifnya.

Manusia mempunyai kemampuan untuk menerima dan menyampaikan pendidikan melalui kegiatan pendidikan. Komponen kebudayaan dan pendidikan saling terkait erat dan terjalin di seluruh masyarakat. Di sisi lain, budaya mewujudkan praktik, institusi, dan struktur pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan kebudayaan dan kegiatan peradaban. Oleh karena itu, komponen pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan masyarakat pada budayanya selalu hadir baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Pendidikan berubah menjadi alat untuk mewariskan budaya kepada generasi berikutnya dan masyarakat. Selain itu, pendidikan membantu melestarikan budaya, yang membantu anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa yang utuh.

Sistem pendidikan dan pengajaran yang dicita-citakan para founding fathers negeri ini bukanlah sistem sekuler, non-agama yang mereka terima dari pemerintahan kolonial Belanda, dan bukan juga sistem yang mereka terima dari umat Islam. Tampaknya tujuan mereka adalah untuk menggabungkan, atau mengintegrasikan, dua sistem pendidikan dan pengajaran sejarah budaya negara ke dalam satu sistem pendidikan nasional.

Pendidikan yang unggul dan berkualitas tinggi adalah jenis pendidikan yang terhebat. Memperoleh pendidikan berkualitas tinggi tidak semudah membalikkan telapak tangan; terdapat prosedur dan tindakan yang perlu diikuti untuk memastikan bahwa pendidikan berhasil dilaksanakan dan berkualitas tinggi. Karena kurikulum merupakan kunci untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, maka kurikulum yang kuat dengan sendirinya akan mendorong pendidikan yang berkualitas.

Selain mengajar siswa dari sudut pandang intelektual, pendidikan yang baik mengintegrasikan tiga kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Tentu saja, sekolah harus menyediakan wadah bagi anak untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Di Indonesia, ada tiga jenis lembaga pendidikan: sekolah, madrasah, dan pesantren. Satu-satunya pesantren di nusantara yang berakar pada adat istiadat asli adalah pesantren Islam. Sementara itu, interaksi pihak eksternal mendorong pendirian madrasah dan sekolah. Komite Investigasi Pengajaran Republik Indonesia mengeluarkan usulan berikut ini agar pelajaran agama disampaikan di semua sekolah pada jam sekolah untuk memenuhi tugasnya, khususnya di bidang pendidikan agama (Kamal, n.d.).

Akibat interaksi antara masyarakat Indonesia dan penjajah, sekolah ini menjadi terkenal. Sementara itu, madrasah muncul sebagai reaksi terhadap gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah dan umat Islam di Indonesia. sekaligus berfungsi sebagai lembaga alternatif terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh kolonialis. Sejak didirikannya pondok pesantren dan madrasah sebagai wadah dakwah dan pemajuan Islam, maka ketersediaan materi PAI (Pendidikan Agama Islam) tidak menjadi kendala. Di sekolah negeri, khususnya di sekolah negeri, hal ini tidak terjadi.

Keberadaan mata pelajaran PAI di lembaga “warisan” kolonial ini merupakan perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang berlaku. Saat ini, kurikulum otonom menjadi pedoman pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Selama dua tahun terakhir, Kurikulum Mandiri telah diterapkan. Kurikulum otonom ini terinspirasi dari Merdeka Belajar, semboyan sebuah sekolah swasta yang berlokasi di Jakarta. Siswa dapat memilih bagaimana mereka ingin belajar dalam program mandiri berdasarkan minat dan keterampilan masing-masing. Kurikulum Independen menawarkan kebebasan yang sama kepada guru dalam memilih sumber daya pengajaran mereka. Dengan demikian, pendidik mampu melaksanakan pengajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan minat setiap siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur. Penulis menggunakan pendekatan ini karena meskipun banyak artikel yang membahas permasalahan PAI di sekolah negeri, namun inti permasalahannya belum terkuak. Oleh karena itu, permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang disarankannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor mendasar yang menyebabkan pendidikan agama Islam tidak memuaskan, dan kami memiliki sejumlah solusi untuk mengatasi masalah ini (Kamal, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Pada masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), sekolah pertama kali didirikan di Indonesia sebagai “warisan” penjajah. VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon pada tahun 1607, dan pada tahun 1617 memperluas hingga Batavia (Jakarta). Tujuan utama pendirian lembaga ini adalah untuk menghalangi agama Katolik, yang sebelumnya disebarkan oleh Portugis, dengan mempromosikan Calvinisme, sebuah agama Protestan. Sekolah didirikan lebih luas setelah Hindia Belanda mengambil kendali VOC pada tahun 1816.

Salah satu misi Belanda di Indonesia adalah penyebaran agama Kristen. Oleh karena itu, banyaknya kebijakan anti-Muslim yang dilakukan Belanda selama dominasi mereka di Indonesia tidaklah mengejutkan. Misalnya, pelajaran agama tidak boleh diajarkan di sekolah negeri milik pemerintah dan hanya dapat diajarkan di luar jam kerja sesuai dengan kebijakan netralitas terhadap agama dalam Konstitusi Hindia Belanda (Indische Staatsregeling). Sementara itu, Belanda memperbolehkan pendidikan agama sebagai tambahan di lembaga (swasta) tertentu, dengan ketentuan bahwa anak-anak tidak dapat berpartisipasi jika orang tuanya melarang mereka melakukannya. Pendekatan Belanda pada praktiknya tidak netral. Pemerintah Belanda lebih mendukung agama Kristen pada umumnya dan bantuan keuangan pada khususnya. Setiap tempat tinggal mempunyai sekolah Kristen, yang diakui sebagai lembaga pemerintah dan mendapat subsidi rutin. Meskipun misi Kristen diperbolehkan, penyebaran Islam dilarang di tempat-tempat yang terdapat komunitas ananemis. Pemerintah Belanda melarang penghinaan terhadap umat Kristen namun menoleransi upaya untuk menyinggung umat Islam.

Indikasi lebih lanjut mengenai diskriminasi Belanda terhadap umat Islam adalah ditetapkannya Peraturan Guru (Guru Ordonantie) pada tahun 1905, yang menetapkan bahwa semua pengajar agama harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelum mulai bekerja. Undang-undang Guru tahun 1925 kemudian menggantikan Undang-undang

tahun 1905 ini, dengan sebagian besar teksnya tetap sama. Aturan ini hanya mewajibkan pengajar agama untuk memberitahukan sebelum pelajaran; hal ini tidak memerlukan persetujuan mereka, dan jika mereka melakukan sebaliknya, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Undang-undang lainnya, *Wild School Ordonantie*, disahkan pada tahun 1932 dan memberikan pemerintah Belanda kekuasaan untuk melarang dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak disetujui oleh pemerintah. Sulitnya umat Islam menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan dapat diketahui berdasarkan peraturan diskriminatif tersebut di atas. Sikap dan reaksi umat Islam terhadap praktik diskriminatif ini mempunyai banyak bentuk, yang Maksud bagi menjadi dua kategori: ofensif dan defensif.

Banyak ulama tradisional (khususnya di Jawa) mengambil sikap defensif, mundur ke lokasi terpencil jauh dari pengawasan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Hal ini memberikan keleluasaan bagi para ulama untuk menyebarkan pengetahuan Islam yang tepat kepada generasi muda dan membekali mereka untuk menjadi pemimpin yang cakap dan siap melawan penjajah atas nama jihad. Sementara itu, sejumlah pemimpin Islam, yang dipimpin oleh kalangan reformis, melancarkan strategi ofensif dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam ala Belanda yang bertentangan dengan sekolah-sekolah Belanda yang mengedepankan Kristen. Lembaga pendidikan Islam modern seperti *Sumatra Thawalib* (1919), *Madrasah Adabiyah* (1909), *Sekolah Adabiyah* (1915), dan *Madrasah Diniyah Zainudin Labay* (1916) semuanya telah mengadopsi pendekatan agresif ini. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam yang canggih dalam jumlah besar di seluruh negeri.

Pasca kekalahan Belanda (1602-1942), nasib Jepang membaik. Berbeda dengan pemerintah Belanda yang cenderung keras terhadap umat Islam, kebijakan pemerintah Jepang lebih lunak dan berupaya memenangkan umat Islam. Selanjutnya pendidikan agama dapat diajarkan di sekolah nasional. Selain itu, pusat agama yang berdiri pada Abad Pertengahan berganti nama menjadi *Shumubu*, dan pimpinannya dilimpahkan kepada Imam Islam (KH. Hasyim Asy'ari), pondok pesantren sering menerima pengunjung dan sumbangan. Banyak organisasi kemasyarakatan seperti PETA (*Pembela Tanah Air*), *Hizbullah*, dan MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*) yang telah berdiri, begitu pula *Sekolah Tinggi Islam* di Jakarta (di bawah kepemimpinan KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta).

Jepang tidak lebih unggul dari Belanda meskipun pemerintahnya bersikap lunak terhadap umat Islam. Kampanye ini dimaknai sebagai taktik Jepang untuk membujuk umat Islam agar memihak Jepang dalam konflik di Asia Timur Raya. Selain itu, Jepang ingin memfasilitasi pengawasannya terhadap aktivitas Muslim, oleh karena itu Jepang bersedia mengizinkan pendirian beberapa organisasi Muslim.

Era Orde Lama sering digolongkan ke dalam tiga fase sejarah: masa demokrasi terpimpin (1959–1965), masa demokrasi liberal (1950–1959), dan masa kemerdekaan (1945–1950). Periodisasi ini menunjukkan betapa rapuhnya lingkungan sosial politik pada masa Orde Lama. Gejolak situasi ini juga berdampak langsung pada sistem pendidikan di negara tersebut, termasuk ketersediaan pelajaran agama di sekolah umum.

Reformasi di bidang pendidikan dan pengajaran dimulai segera setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, dengan tujuan memulihkan sumber daya manusia yang telah lama dihancurkan oleh penjajah. Dalam rapatnya tanggal 29 Desember 1945, Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tujuan

utama dari rekomendasi ini adalah mencoba melakukan reformasi pendidikan dan pengajaran sesegera mungkin agar mengikuti rencana utama bisnis pendidikan dan pengajaran yang baru.

Panitia Investigasi berhasil merumuskan beberapa poin penting dalam laporan yang diselesaikan pada tanggal 2 Juli 1946. Penciptaan tujuan pendidikan nasional difokuskan pada prakarsa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan meningkatkan kesadaran nasional, karena tujuan tersebut berkaitan langsung dengan keadaan bangsa Indonesia yang baru terbentuk.

Komite Penyelidikan memberikan rekomendasi mengenai pendidikan agama sebagai berikut: (a) semua sekolah menyelenggarakan pendidikan agama pada jam sekolah; (b) guru yang digaji pemerintah; (c) pendidikan agama ditawarkan mulai kelas IV di sekolah dasar; (d) instruksi ini dilaksanakan seminggu sekali pada waktu-waktu tertentu; (e) guru agama diangkat oleh Kementerian Agama; guru agama juga harus berkualifikasi dalam pendidikan umum; (f) pemerintah menyediakan buku pendidikan agama; (g) guru agama mendapat pelatihan; (h) Pesantren dan Madrasah harus ditingkatkan; dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak bersifat wajib.

Saran-saran ini menunjukkan bahwa, meskipun kesadaran meningkat, PAI di sekolah umum masih sangat langka. Cukup seminggu sekali, dimulai dari kelas empat. Sempat terjadi perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis mengenai konten PAI yang akan diberikan kepada siswa, namun pada akhirnya diambil keputusan dengan suara bulat. Misalnya, Ki Hajar Dewantara, Menteri PP dan K yang pertama, hanya sepakat bahwa pendidikan agama harus fokus pada pengembangan karakter; ia tidak setuju jika pendidikan agama harus mengajarkan fiqh Islam secara utuh. Senada dengan itu, Ketua Taman Siswa Poerbakawatja menentang pengajaran agama di lembaga-lembaga publik, kecuali di lembaga-lembaga yang sepenuhnya bersifat keagamaan seperti keluarga, asrama, pesantren, atau lembaga-lembaga yang sangat spesifik.

B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Kurikulum merupakan motor penggerak pembangunan pendidikan, maka kurikulum memegang peranan penting dalam bidang pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan kedudukan dan kunci pendidikan karena menentukan arah, isi, dan metode pengajaran, yang kesemuanya berdampak pada jenis lulusan yang dihasilkan suatu lembaga dan kualifikasinya. Aqidah, atau iman, moralitas, Fiqh, atau hukum Islam, Tarikh, atau sejarah, dan berbagai unsur Al-Qur'an merupakan kurikulum pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah. Tujuan mendasar pendidikan Islam adalah memberikan siswa rasa spiritualitas yang kuat dan kemantapan dalam keyakinan mereka.

Penerapan Kurikulum PAI dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah negeri sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sumber daya dan potensi sekolah, masyarakat sekitar, masyarakat, serta latar belakang sosial dan kekeluargaan siswa. Cara guru memandang kurikulum juga memainkan peran penting dalam proses ini.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum PAI sebagai berikut:

a. Faktor Guru

Salah satu komponen pendidikan yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan memosisikan diri sebagai tenaga profesional dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin cepat berubah adalah guru. Akibatnya, instruktur berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa saat mereka belajar, selain hanya sekedar menjadi transfer nilai. Komponen guru sangat penting

dalam implementasi kurikulum dan secara langsung mempengaruhi bagaimana sekolah sebagai lembaga sosial berkembang.

b. Faktor Siswa

Peserta didik merupakan makhluk tersendiri yang tumbuh sesuai dengan fase perkembangannya. Semua aspek kepribadian anak merupakan bagian dari pertumbuhannya, namun setiap aspek perkembangan tersebut berkembang dengan kecepatan dan ritme yang berbeda untuk setiap anak. Mirip dengan guru, komponen latar belakang siswa (pengalaman formatif siswa) dan sifat pribadi (atribut siswa) dapat berdampak pada proses pembelajaran. Faktor latar belakang meliputi jenis kelamin siswa, tempat lahir, tempat tinggal, status sosial ekonomi, latar belakang keluarga, dan rincian lainnya. Sedangkan berdasarkan sifat-sifat siswa, meliputi keterampilan dasar, pengetahuan, dan watak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi cara siswa belajar adalah sikap dan suasana hati mereka di kelas. Selain anak-anak yang pendiam, terkadang kita menjumpai individu yang hiperkinetik (sangat bersemangat), dan banyak siswa juga yang kurang semangat belajar. Segala sesuatu tentang hal ini akan berdampak pada cara siswa belajar di kelas. Namun dalam pertukaran pembelajaran, peran guru dan siswa sangatlah penting.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaannya. Fasilitas, lingkungan sekolah, keluarga, siswa, dan persepsi guru terhadap kurikulum semuanya mempunyai dampak. Departemen Agama mencatat ciri-ciri siswa dan permasalahan yang mereka temui di sekolah umum, termasuk tingkat keterampilan siswa yang bervariasi, durasi kelas yang singkat, tingginya minat siswa terhadap mata pelajaran lain, dan kurangnya sumber daya PAI.

Segala sesuatu yang secara langsung membantu kelancaran proses pendidikan dianggap sebagai fasilitas; contohnya antara lain media pendidikan, instrumen pendidikan, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sementara itu, infrastruktur—seperti penerangan sekolah, toilet, dan jalan—dapat membantu keberhasilan proses pembelajaran secara tidak langsung. Prasarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang mungkin mempengaruhi proses pembelajaran karena kelengkapannya akan membantu guru dalam penataan proses pembelajaran. Sekolah dengan sarana dan prasarana yang lengkap dapat memperoleh manfaat dari beberapa faktor, antara lain: a) meningkatnya motivasi dan semangat guru; dan b) lebih banyak pilihan pembelajaran bagi siswa karena banyaknya pilihan.

d. Faktor Lingkungan

Ketika mempertimbangkan proses pembelajaran dari perspektif lingkungan, ada dua aspek yang dapat berdampak: faktor iklim sosial-psikologis dan faktor-faktor yang berkaitan dengan organisasi kelas. Faktor-faktor yang berkaitan dengan organisasi kelas, seperti jumlah siswa di kelas tertentu, merupakan elemen penting yang mungkin mempengaruhi proses pendidikan. Kelas yang terlalu besar akan mempersulit pencapaian tujuan pembelajaran. Hubungan antara mereka yang merupakan bagian dari lingkungan sekolah, seperti antara siswa dan guru, antara pengajar dan siswa, dan bahkan antara guru dan administrator sekolah, merupakan iklim sosial-psikologis internal. Interaksi positif antara sekolah dan dunia luar, seperti antara pendidik dan orang tua siswa atau antara sekolah dan lembaga setempat, merupakan contoh iklim psikologis eksternal.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian pencapaian belajar yang berorientasi pada aspek afektif tidak hanya terpusat pada kognitifnya saja.

- b. Mengubah cara pandang terhadap kurikulum pendidikan agama Islam.
- c. Adanya pendekatan yang bersifat values clarification dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.
- d. Mengubah strategi pembelajaran dari model pembelajaran tradisional menjadi model pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan.
- e. Adanya kerja sama antara guru, kepala sekolah, masyarakat dan keluarga dalam memperhatikan perkembangan sikap anak.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di sekolah belajar dan sebagai pembelajaran. Pembelajaran agama Islam bukan sekedar kurikulum tertulis yang hanya disampaikan sebagai pengetahuan (kognitif) saja. Tetapi kurikulum PAI mampu memberikan nilai terhadap peserta didik dengan pemahaman, perilaku, sikap terhadap materi yang ada.

Mata kuliah pendidikan agama Islam dalam kurikulum GBPP tahun 1994 pada dasarnya membahas tujuh topik utama: Alquran dan Hadits, iman, atau Aqidah; akhlak; fiqh (hukum Islam); dan Tarikh (sejarah), yang sangat menekankan pertumbuhan politik. Alquran, Aqidah, Akhlak, Fiqih, dan petunjuk ibadah direduksi menjadi lima komponen besar dalam kurikulum 1999, beserta tanggal atau sejarah yang menekankan pada kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran agama.

C. Hambatan dan Solusi Pendidikan Islam di Sekolah Umum

1. Hambatan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Meskipun pendidikan agama Islam di sekolah umum telah berhasil secara keseluruhan, masih ada sejumlah permasalahan dan keterbatasan yang perlu diatasi. Prestasinya antara lain adalah diperkenalkannya program pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum, yang jika dilihat dari kacamata tujuan pendidikan nasional, dianggap sukses. Departemen Agama telah berhasil mewujudkan tujuan konvergensi dengan mendukung pengajaran agama di sekolah-sekolah umum. Selain pendidikan umum, anak-anak sekolah negeri juga diajarkan tentang agama di berbagai kelas. Kedua, karena siswa belajar dan mengamalkan agama, sekolah tidak sepenuhnya sekuler. Ketiga, meskipun ilmu-ilmu umum dahulu dianggap bersifat duniawi dan tidak boleh dipelajari di madrasah atau sekolah agama, namun kini lembaga-lembaga tersebut mengajarkan ilmu-ilmu umum kepada siswanya. Setelah mengikuti perkuliahan Pendidikan Agama Islam (PAI), mahasiswa diharapkan memperlihatkan sembilan tanda yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilannya:

- a. Peserta didik memiliki pengetahuan fungsional tentang agama Islam dan mengamalkannya.
- b. Peserta didik meyakini kebenaran ajaran agama Islam dan menghormati orang lain meyakini agamanya pula.
- c. Peserta didik bergairah dalam beribadah.
- d. Siswa terbiasa membaca kitab suci al-Qur'an dan berusaha memahaminya.
- e. Peserta didik memiliki sifat kepribadian muslim (berakhlak mulia).
- f. Peserta didik rajin belajar, giat belajar dan gemar berbuat baik.
- g. Peserta didik mampu mensyukuri nikmat Allah SWT.
- h. Peserta didik memahami, menghayati dan mengambil manfaat dari tarikh Islam.
- i. Peserta didik mampu menciptakan suasana kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Muhaimim menuliskan indikator-indikator kelemahan pelaksanaan PAI di sekolah-sekolah:

- a. PAI kurang bisa mengubah pengetahuan Agama yang kognitif menjadi makna dan nilai atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.
- b. PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama.
- c. PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial budaya atau bersifat statis kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga Peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Selain itu, Ahmad Tafsir menyebutkan 12 kelemahan PAI di sekolah:

- a. Kurangnya dukungan orang tua murid
- b. PAI kurang diminati
- c. Kurikulum PAI terlalu luas
- d. Pelajaran agama kurang berguna bagi kehidupan material
- e. Tidak di UN-kan
- f. Kurang Peneladanan dari guru
- g. Kurangnya Pembiasaan dari sekolah
- h. Penampilan guru agama kurang menarik
- i. Budaya Global
- j. Spiritualisme melawan Materialisme
- k. PAI tidak menyatu dalam sistem
- l. PAI tidak menjadi fokus dalam kehidupan sehari-hari.

2. Solusi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Minimnya jam pelajaran agama Islam di sekolah menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pengajaran agama Islam di sana. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran PAI yang menumbuhkan pengembangan karakter pada siswa. Intinya, persona ini lebih banyak mengandung unsur emosional. Dengan mengacu pada taksonomi pembelajaran Benjamin. S. Bloom membahas ranah afektif, yang meliputi:

- a. Penerimaan (*Receiving*)
- b. Sambutan (*Responding*)
- c. Penilaian (*Valuing*)
- d. Pengorganisasian (*Organization*)
- e. Karakterisasi (*Characterization*)

Banyak persoalan yang muncul ketika menerapkan pembelajaran agama Islam di sekolah. Berbagai masalah mungkin disebabkan oleh internal atau eksternal. Variabel internal sekolah mencakup infrastruktur yang tidak memadai atau guru yang tidak berpengalaman. Sementara itu, kurangnya dukungan masyarakat (orang tua siswa) atau kurangnya bantuan dari pemerintah daerah dapat menimbulkan komplikasi eksternal. Pembelajaran yang efektif dan bermakna diperlukan untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diperlukan dalam pembelajaran yang dijabarkan dalam tujuan yang telah ditetapkan, karena selama ini siswa dianggap tidak menganggap proses pembelajaran bermakna. Proses pengajaran agama Islam di sekolah dapat menggunakan beberapa teknik dan pendekatan pembelajaran, seperti:

- a. *Student Centered Instruction*, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti diskusi dalam berbagai variasi, demonstrasi dan games. Dituntut peran aktif siswa, dan guru sebagai fasilitator
- b. *Collaborative Learning*, yaitu pembelajaran aktif di mana peserta didik dan guru berkolaborasi atau dengan warga sekolah lainnya.

- c. *Cooperative learning*, yaitu proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran secara berkelompok dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru
- d. *Self discovery learning*, yaitu belajar melalui penemuan mereka sendiri, melalui observasi dan pengamatan terhadap masalah yang harus mereka pecahkan.
- e. *Quantum learning*, yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen diri siswa, dengan pendekatan individu dan kelompok.
- f. *Contextual Teaching and Learning (CTL)*, yaitu strategi yang digunakan untuk membantu peserta didik untuk memahami makna dan materi pelajaran dengan mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan konteks kehidupan mereka.

D. Jam Pelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah Umum

Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam diatur secara metodis pada masa kemerdekaan era Orde Lama (1945–1959). Dalam hal ini, pendidik agama yang bekerja di sekolah negeri perlu memiliki pengetahuan umum yang mendukung perannya. Dua jam pengajaran diberikan setiap minggunya. Ajarannya meliputi akhlak, syariah, dan keimanan. Penyaluran pendidikan agama Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan program pendidikan saat ini.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah: kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama dan moralitas, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Sementara itu, mengenai struktur kurikulum SD/MI dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri 2). Subtansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3). Pembelajaran pada kelas I s/d III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV s/d VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran; 4). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan. 5). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35menit. 6). Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 –38 minggu. Sedangkan struktur kurikulum SMP/MTs dapat dijelaskan sebagai berikut: Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. 2). Subtansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 4). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit. 5). Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 –38 minggu.

Sementara itu struktur kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut: 1). Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, Kelas XI dan XII Program IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. 2). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan. 3). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 4). Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34–38 minggu. Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun

mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

Secara konseptual teoretis pendidikan agama disekolah berfungsi sebagai: 1) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. 2) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. 3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial. 4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 5) Pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari. 6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya. 7) Penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

Namun, peran penting pendidikan Islam dalam kegiatan keagamaan berbasis sekolah akan menyebabkan perhatian pemerintah diarahkan pada semua aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan Islam (termasuk peraturan, renovasi dan pemeliharaan fasilitas, peningkatan jumlah jam kerja). diajarkan, meningkatkan rasio siswa-guru, dan sebagainya) seiring berjalannya waktu. Namun permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara; pertama, hasil yang diharapkan, Sesuatu yang sangat mendekati makna sebenarnya dari istilah “meningkatkan Iman dan Takwa” adalah tujuan pendidikan agama. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk setiap jenis program pendidikan (sebagaimana tercantum dalam SD-PT) harus diperhatikan, antara lain keterbatasan waktu, kondisi lingkungan, jenis sekolah, dan tingkat partisipasi.

Mengalokasikan materi dan waktu adalah prioritas kedua. Mustahil menyelesaikan luasnya muatan pendidikan agama Islam mengingat waktu pengajaran yang diberikan dua jam setiap minggunya, apalagi jika ada hubungannya dengan gagasan mastery learning. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah pengajaran agama yang substansial di sekolah yang mempunyai waktu terbatas, seperti: Pendidikan agama ditekankan dalam bentuk kegiatan pembiasaan atau pembiasaan, seperti belajar mengucapkan salam, mengikuti salat berjamaah di zuhur, berdoa sebelum dan sesudah kelas dengan guru muslim, dan latihan membaca surat-surat singkat sebelum dan sesudah kelas. Selain itu, semua profesor Muslim berupaya untuk memasukkan cita-cita agama ke dalam semua disiplin ilmu dan bidang studi mereka.

Siswa sebagai pembelajar berada pada urutan ketiga. Analisis faktual mengungkapkan bahwa latar belakang siswa, termasuk latar belakang sekolah, keadaan rumah, dan pengalaman keagamaan, sangat beragam, terutama di sekolah menengah. Tentu saja sangat sulit bagi para pengajar agama untuk memenuhi kewajibannya dan menyelesaikan program pengajaran yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam dalam keadaan seperti itu.

Keempat, Orang tua peserta didik memiliki keterlibatan tentang peranan yang sangat krusial dalam pengembangan program pembelajaran agama. Saat ini, ada persoalan serius yang dihadapi para orang tua yang terlalu sibuk untuk mengawasi pendidikan anak-anaknya di rumah, termasuk pelajaran agama.

Kelima, lingkungan pendidikan. Siswa menjadi bingung dalam memutuskan antara konflik yang muncul antara cita-cita ideal yang ditanamkan di sekolah dengan kebenaran sosial di masyarakat, karena proses internalisasi keyakinan agama yang dilakukan di sekolah seringkali bertentangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

Keenam, guru agama. Rasio guru agama terhadap peserta didik, profesionalismenya, bakat keilmuannya, kualitasnya, dualisme birokrasi pengelolaan

pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama), dan permasalahan lainnya merupakan permasalahan yang sering muncul dalam diri guru agama.

Ketujuh, metodologi. Berikut daftar kekurangan metodologis pendidikan Islam: Kurang mampu membantu peserta didik memahami dan menghayati prinsip-prinsip agama yang harus mereka serap, atau kurang mampu menerjemahkan ilmu kognitif agama menjadi makna dan nilai. B). kurang mampu berkolaborasi dengan inisiatif pendidikan yang tidak bersifat keagamaan. b) Secara kontekstual stagnan dan terputus dari sejarah, atau kurang menggambarkan konteks sosio-kultural, sehingga tidak relevan dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami cita-cita keagamaan sebagai prinsip yang meresap dalam kehidupan sehari-hari.

E. Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Merdeka Belajar

Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mesti dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pelajaran pendidikan agama Islam yang cermat dapat membantu mencapai tujuan yang selaras dengan perspektif masa depan dan sejarah bangsa. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang selaras dengan rencana pembelajaran dan kegiatan merupakan hal yang perlu dicapai. Tujuan pendidikan Pendidikan Agama Islam harus terdefinisi dengan baik dan mencakup semua periode sejarah dan kemajuan. Hal-hal berikut ini patut menjadi pertimbangan dalam tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar”.

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan beripikir kritis
2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas
3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi.
4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi
5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang konfiden atau kepercayaan diri.

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk mengembangkan sikap, kepribadian, dan kemampuan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya masing-masing di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam hendaknya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kebebasan siswa. Kebebasan memilih mata pelajaran yang termasuk dalam Pendidikan Agama Islam dan mengadvokasinya di masyarakat dan di sekolah. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyikapi penetapan prioritas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada program “Merdeka Belajar”, antara lain:

1. Kewajiban tiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan peserta didiknya meski dia minoritas. Guru agama ini nantinya yang memiliki otoritas untuk memperkuat keberagaman peserta didiknya.
2. Lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengajarkan agamanya.
3. Lembaga keagamaan mempersiapkan guru-guru yang memiliki keahlian tentang agama dan sekaligus bisa menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada.

4. Pemerintah dalam hal ini kerja sama dengan sekolah/satuan pendidikan merancang kurikulum untuk tercapainya proses belajar yang dapat menumbuhkan kemerdekaan belajar.

KESIMPULAN

Dari uraian materi di atas yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Materi pendidikan agama Islam mendapatkan diskriminatif khususnya sekolah negeri maka tim penyelidik dalam mengisi kemerdekaan mengusulkan beberapa hal yaitu: a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah; b) Para guru dibayar oleh pemerintah; c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV; d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu; e) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum; f) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama; g) Diadakan latihan bagi para guru agama; dan h) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan (i) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.
2. Kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah terdiri dari beberapa aspek yaitu, aspek al-Qur'an Hadits, Keimanan atau Aqidah, Akhlak, Fiqh (Hukum Islam), dan aspek Tarikh (Sejarah). Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengantarkan peserta didik agar memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual.
3. Kelemahan dan Solusi pendidikan agama Islam di sekolah umum di antaranya: A. Kelemahan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: a) Kurangnya dukungan orang tua murid; b) PAI kurang diminati; c) Kurikulum PAI terlalu luas; d) Pelajaran agama kurang berguna bagi kehidupan material; e) Kurang Peneladanan dari guru; f) Kurangnya Pembiasaan dari sekolah; g) Penampilan guru agama kurang menarik; h) Budaya Global; i) Spiritualisme melawan Materialisme; j) PAI tidak menyatu dalam sistem; dan k) PAI tidak menjadi fokus dalam kehidupan sehari-hari. B. Solusi PAI di sekolah umum; 1) *Modeling-Imitating*: pendekatan pembelajaran PAI dengan menghadirkan perilaku yang baik dipraktikkan di lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua; 2) Materi PAI tidak sebatas materi belaka yang sifatnya abstrak, tetapi peserta didik mendapat pembuktian secara praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari; 3) *Reflecting*: Pendekatan yang bertujuan, peserta didik mampu mendapatkan sebuah pantulan atau masukan dengan apa yang telah dipelajarinya; 4) *Problem Solving*: pendekatan dengan melibatkan peserta didik dari setiap pembelajaran PAI; 5) *Deep Discussion*: pendekatan pembelajaran PAI yang menuntun masing-masing peserta didik berdiskusi secara mendalam, analisis, kritis terhadap pemahaman ajaran Islam; 6) *Socialization*: pendekatan pembelajaran PAI sebagai suatu proses implementasi yang dialami bagaimana sebuah ajaran atau nilai (PAI) bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada pertentangan; dan 7) *Autentik Assesment*: pendekatan pembelajaran PAI dengan penilaian dan evaluasi yang terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap anak didiknya.
4. Jam Pelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah Umum Secara konseptual-teoretis pendidikan agama disekolah berfungsi sebagai: a) pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. b) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. c) penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial, d) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, e)

pengecahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari, f) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan non-nyata), g) sistem dan fungsionalnya penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

SARAN

Pendidikan agama Islam di sekolah umum masih sangat terbatas, oleh karena itu hendaknya seluruh pihak yang ada di lembaga pendidikan terutama pendidikan umum selalu mendukung dalam setiap mata pelajaran yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Majid dkk. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, dalam jurnal el HiKMAH Jurnal Kajian Islam dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 12. No 2, 2018 (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005) 145 dan 151
- Abdul Malik, dkk. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 176.
- Amril M, Witari Triarni Panggabean. Belajar Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka, (Riau: Jurnal Pendidikan Tambusai), h. 311
- Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 32-34.
- Assegaf, Politik Pendidikan Nasional, hlm. 115.
- Azyumardi Azrah, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III (Cet. I; Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2012), h. 4.
- Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 333; Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), h. 17.
- Departemen Agama RI. 2003. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam UndangUndang Sisdiknas. Depag RI: Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003), h. 5-8.
- Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 49.
- Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Logos, 2001), h.8.
- Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2001), h .1.
- Karel A. Steenbrink, Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 90-91; Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, h. 52-53.
- Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).
- Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, h. 116-117
- M. Shabir, Usman, Kamal. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM, (Makassar: Unit Publikasi Ilmiah Intelektual Madani Indonesia), h. 61.
- Muhaimin. Nuansa Baru Pendidikan Islam. (Jakarta: Raja Grafindo 2006.), h. 37
- , Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.), h. 259.
- Nata, Abuddin. Manajemen pendidikan: Mengatasi Kelemahan pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Kencana. 2003), h. 31.

- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3-4
- Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 88.
- Rahim. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 50-51; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, h. 41
- S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 4-5
- Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, h. 90
- Tafsir, Ahmad. *Penelitian Pada Pendidikan Agama Islam, (Studium General, Program Magister PAI UIN Jakarta, 6 November 2013)*, h. 184
- VOC, komisi dagang Belanda (Belanda swasta), mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1602 menggantikan Portugis dan Spanyol yang telah sekitar satu abad sebelumnya (sejak awal abad 16) berada ke Indonesia (khususnya di Maluku). Baca lebih lanjut dalam: Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 34-37
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.152
- Kamal. (n.d.). *Pengenalan Evaluasi Program Pembelajaran Menggunakan Stake*.
- Kamal, *Tokohnya Kegiatan Dalam Dunia Pendidikan Dan Perkembangan Teknologi Informasi*. (n.d.).